

PEMBAYARAN KLIM TABUNGAN HARI TUA
ASURANSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PT TASPEN (PERSERO) CABANG PADANG

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

AYU CYANTHIA

01.140.021

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2005

No Reg :1955/PK II/08/2005

PEMBAYARAN KLIM TABUNGAN HARI TUA ASURANSI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PT TASPEN (PERSERO) CABANG PADANG

(Ayu Cyanthia, 011-40021, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 75 Halaman,
Tahun 2005)

ABSTRAK

Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang disingkat dengan PT TASPEN (Persero) adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri sebagai salah satu jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada pegawai negeri sipil dan anggota keluarganya, baik pada saat aktif bekerja ataupun pada akhir masa pengabdianya kepada negara. Tabungan Hari Tua adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta pada waktu mencapai usia pensiun/bagi ahli warisnya (suami/istri/anak/orang tua) pada waktu peserta meninggal dunia pada masa aktif.

Permasalahan yang menjadi objek dalam skripsi ini adalah 1. Tindakan yang diambil PT TASPEN terhadap peserta/ahli waris yang tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen pada saat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Klim Tabungan Hari Tua atau Asuransi Kematian disebabkan kehilangan/kerusakan dokumen yang diperlukan untuk dapat dilakukan pembayaran, 2. Usaha yang dapat dilakukan ahli waris untuk membuktikan bahwa ia paling berhak atas pembayaran Tabungan Hari Tua/Asuransi Kematian peserta dari pada ahli waris lainnya, 3. Pelaksanaan pembayaran Klim Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kematian pada PT TASPEN (Persero) Cabang Padang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan pelaksanaan/fakta yang ditemui di Kantor PT TASPEN (Persero) Cabang Padang, data yang diperlukan diperoleh melalui wawancara dengan petugas TASPEN serta peserta/ahli waris yang penulis temui di kantor Taspem untuk mendapatkan data primer dan melalui penelitian kepustakaan serta studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, data ini lalu diedit, dan diberi kode terhadap data yang diperlukan kemudian dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pembayaran Klim Tabungan Hari Tua Asuransi Pegawai Negeri Sipil pada PT TASPEN (Persero) Cabang Padang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sehingga dapat dilakukan dengan baik, namun kendala tetap ditemui yang pada umumnya berada dari kesalahan/kelalaian dari peserta/pengaju SPP Klim pada PT TASPEN, upaya antisipasi yang telah dilakukan PT TASPEN adalah dengan memberikan informasi yang lebih konkrit mengenai tata cara pengurusan SPP Klim pada PT TASPEN (Persero) Cabang Padang.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada alinea ke empat menyebutkan antara lain tujuan negara yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum yang dapat diartikan bahwa negara memajukan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu ketentuan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah diharapkan mampu memberikan jaminan kepada seluruh rakyatnya dalam peningkatan kesejahteraan sosial.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah diantaranya dengan memberikan jaminan sosial dalam bentuk asuransi sosial. Asuransi Sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat.¹

Beberapa program asuransi sosial yang telah dibentuk antara lain Asuransi Sosial Pegawai Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963, Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964, Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964

Pegawai negeri adalah sebagian kecil dari masyarakat yang mengabdikan dirinya kepada negara untuk melaksanakan tugas tertentu

¹ Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang *Usaha Perasuransian*

lengan mendapatkan imbalan berupa gaji. Sebagai aparatur negara pegawai negeri merupakan ujung tombak dalam terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan. Dengan tanggung jawab yang besar tersebut sudah sepantasnya apabila mereka mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah karena ini dapat menunjang efektifitas dan kreatifitas mereka dalam bekerja hingga akhir masa tugas. Perhatian tersebut bukan hanya untuk dirinya pribadi namun diharapkan juga terhadap anggota keluarga yang menjadi tanggungannya.

Dengan didirikannya Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN TASPEN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963, memberikan jaminan terhadap kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya selama menjalankan tugas sampai akhir masa pengabdian pada negara.

Dalam Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963 disebutkan bahwa tujuan perusahaan adalah menambah kesejahteraan pegawai negeri pada umumnya dengan jalan mengadakan tabungan disertai asuransi sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil makmur materi dan sprituil

Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963 menyatakan bahwa tiap pegawai negeri diwajibkan menjadi peserta dari tabungan dan asuransi.

Peserta dari tabungan dan asuransi ini adalah Pegawai Negeri Sipil (tidak termasuk pegawai dilingkungan Departemen HANKAM).

BAB IV. PENUTUP

Dalam Bab ini penulis mencoba untuk menyimpulkan uraian dari bab-bab terdahulu khususnya mengenai pembahasan masalah yang dirumuskan dan mencoba mengemukakan saran-saran yang berhubungan dengan Pembayaran Kilm Tabungan Hari Tua Asuransi Pegawai Negeri Sipil Pada PT TASPEN (Persero) Cabang Padang.

A. Kesimpulan.

1. Tindakan yang diambil oleh PT TASPEN terhadap peserta/ahli waris yang tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen pada saat pengajuan Surat Permohonan Pembayaran Kilm (SPP Kilm) adalah memberikan pengarahan tentang arti penting dokumen tersebut dan memberi kesempatan pada peserta untuk memenuhi kelengkapan dokumen yang kurang tersebut kemudian memberikan pengarahan mengenai pengurusan SPP KLIM selanjutnya.
2. Ahli waris dapat diambil dari daftar kepegawaian di instansi peserta, ahli waris dari luar memungkinkan apabila ia dapat menunjukkan bukti dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian ahli waris haruslah dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris yang sah dari pada ahli waris lainnya dengan mengemukakan bukti yang dapat mendukung dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku Bacaan.

- Ali, A Hasyimi, Drs. 1993. *Bidang Usaha Asuransi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- , 2002. *Pengantar Asuransi Cet. III*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Darmawi, Herman, Drs. 2001. *Manajemen Asuransi*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Hartono, Sri Rejeki. 1985. *Asuransi dan Hukum Asuransi Di Indonesia*. Semarang : IKIP
- Muhammad, Abdul Kadir. 1990. *Pokok-pokok Hukum Pertanggunggaan*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Murti, Bhisma. 2000. *Dasar-dasar Asuransi Kesehatan*. Yogyakarta : Kanisius.
- Prakoso, Djoko. SH. 1991. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- , 1991. *Asuransi Di Indonesia*. Semarang : Dahara Prize.
- Prodjodikoro, Wiryo. 1991. *Hukum Asuransi Di Indonesia Cet-9*. Jakarta : Intermasa
- Salim, Drs.H.Abbas MA. 2003. *Asuransi dan Manajemen Resiko Ed-2 Cet-7*. Jakarta : PT Raya Grafindo Persada.
- Sastrawidjaja, M Suparman, SH,SU, Endang SH. 1993. *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. Bandung : Alumni.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. *Hukum Pertanggunggaan dan Perkembangannya*. Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM